BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi digital telah melahirkan transformasi dalam setiap lini kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Kemajuan ini kemudian membuka peluang ekonomi yang baru dengan melibatkan aktivitas digital dalam operasional bisnis. Sayangnya, transformasi ini masih belum bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat, hal inilah yang kemudian melahirkan kesenjangan digital yang multidimensional. Padahal, jika dilihat dengan perspektif Islam, menuntut ilmu termasuk menguasai teknologi sesuai zaman merupakan kewajiban ukhrawi dan duniawi yang dapat meningkatkan taraf hidup serta sebagai sarana pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 11 sebagai berikut.

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

Artinya: *Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.*

Ketimpangan digital dalam hal ini bukan hanya terkait infrastruktur, tetapi juga keterampilan dan motivasi pemanfaatan teknologi. Permasalahan ini juga telah menjadi perhatian serius dalam diskusi akademik. Warschauer (2003) menyatakan bahwa kecakapan

digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga literasi informasi, berpikir kritis, dan keterampilan strategis. Djik (2005) juga menegaskan bahwa ada empat tingkat kesenjangan digital: akses, keterampilan, pemanfaatan, dan hasil. Sebagai upaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah menggencarkan program untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Hal ini kemudian menghasilkan peningkatan pada Indeks Literasi Digital Indonesia sebagaimana berikut.

Gambar 1.1.Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 – 2022



Sumber: Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwasanya ada empat kriteria yang dinilai dalam literasi digital, yakni *digital skills* berupa pemahaman atas perangkat keras dan lunak serta sistem operasi digital, *digital culture* berupa upaya membangun wawasan kebangsaan dan budaya di ruang digital, *digital ethics* yaitu menyesuaikan diri berpikir rasional dan beretiket, serta *digital safety*

berupa peningkatan kesadaran perlindungan dan keamanan data diri (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2025). Pada gambar tersebut terlihat bahwa indeks mengalami kenaikan dari 3,49 pada 2021 menjadi 3,54 pada 2022. Meski meningkat, skor ini masih berada dalam kategori sedang, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah.

Studi oleh Jaya et al. (2024)memanfaatkan data IMDI untuk memetakan ketimpangan digital di tingkat distrik dan menemukan bahwa titik panas (*hotspots*) transformasi digital masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah timur Indonesia masih tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan pemerataan tidak hanya pada akses, tetapi juga pada keterampilan dan pemberdayaan.

Namun demikian, meskipun upaya tersebut dilakukan secara masif oleh pemerintah, pada kenyataannya di tingkat lokal, program literasi digital sering kali tidak kontekstual dan tidak berkelanjutan. Studi yang dilakukan oleh Pitrianti et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan digital selama ini biasanya lebih bersifat umum dan tidak spesifik pada kebutuhan ekonomi lokal, sehingga kurang berdampak langsung terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Ketimpangan ini kemudian memunculkan digital paradoks di mana masyarakat memiliki akses internet dan perangkat digital, tetapi tidak semua mampu memanfaatkannya untuk pemberdayaan

ekonomi. Hal ini bukan hanya terjadi di wilayah pedesaan, tetapi juga di kawasan urban dan semi-urban seperti Banjarmasin Timur yang secara infrastruktur cukup memadai. Artinya, terdapat kesenjangan antara potensi digital yang tersedia dan realisasi pemanfaatannya di masyarakat. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (2025) selama empat tahun terakhir, kenaikan pengguna akses digital di Kalimantan Selatan nampak signifikan, hal ini juga ditandai oleh peningkatan jumlah menara telepon seluler di setiap wilayah. Berikut adalah persentase penduduk yang menguasai telepon seluler di Kalimantan Selatan.

Gambar 1.2 Persentase Penduduk yang Menguasai Telepon Seluler di Kalimantan Selatan 2021 – 2024

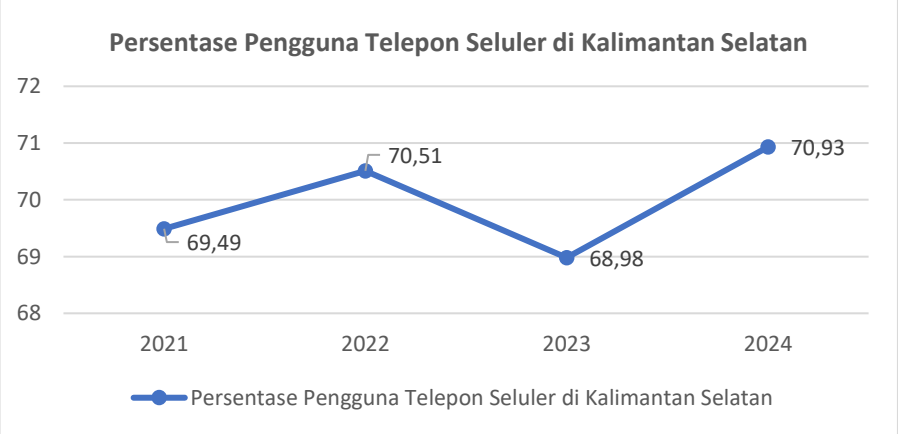

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Angka-angka di atas kemudian memperlihatkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menggunakan ponsel pintar. Sayangnya, mayoritas dari mereka menggunakannya hanya untuk hiburan dan hanya segelintir yang memanfaatkannya untuk kegiatan

produktif seperti jual beli daring, promosi usaha kecil, atau mengikuti pelatihan digital. Hal ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk melihat dinamika perubahan pola interaksi ekonomi warga dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin (2024), koneksi sinyal internet di wilayah Banjarmasin Timur terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga tercermin dari observasi awal peneliti dalam beberapa kegiatan masyarakat, di mana penggunaan internet masih didominasi oleh aktivitas hiburan dan komunikasi dibandingkan kegiatan ekonomi digital. Ini kemudian memunculkan dugaan bahwa tingkat kecakapan digital masyarakat berperan dalam rendahnya intensitas penggunaan internet untuk urusan ekonomi. Urgensi ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza saat berkunjung ke Banjarmasin, yang mana dalam dialognya ia mengungkapkan bahwa setiap UMKM seharusnya telah memperluas pasar dan meningkatkan daya saingnya melalui keterlibatan dalam digitalisasi ekonomi (Nugraha, 2025).

Minimnya kajian kecakapan digital dan intensitas penggunaan internet untuk aktivitas ekonomi di Kota Banjarmasin membuat peneliti tertarik untuk mengangkat topik tersebut, mengingat literatur yang tersedia kebanyakan mengkaji tentang kesenjangan digital secara umum. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara kuantitatif apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat

kecakapan digital masyarakat dan intensitas akses internet mereka khusus untuk urusan ekonomi.

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pembuktian secara empiris dan memperkaya khazanah kajian kesenjangan digital di Indonesia, khususnya pada dimensi pemanfaatan (*utilization gap*). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran rinci dan berbasis data tentang profil kecakapan digital serta pola pemanfaatan internet masyarakat Banjarmasin Timur, yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi program literasi digital yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecakapan digital dengan urusan ekonomi masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas akses internet dengan urusan ekonomi masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kecakapan digital dengan intensitas akses internet pada masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecakapan digital dengan urusan ekonomi masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur
2. Untuk mengetahui hubungan antara intensitas akses internet dengan urusan ekonomi masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur
3. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kecakapan digital dengan intensitas akses internet pada masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Timur

D. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara kecakapan digital dan akses internet dalam konteks ekonomi masyarakat perkotaan, khususnya pada kawasan dengan tantangan sosial ekonomi seperti Kecamatan Banjarmasin Timur. Sebagian besar kajian literasi digital dan akses internet masih terpusat pada wilayah urban yang maju atau semi-urban, sementara dinamika yang terjadi di kawasan urban dengan segmentasi ekonomi menengah ke bawah masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang kontekstual dan berbasis komunitas, yang mempertimbangkan kompleksitas sosial, ekonomi, dan infrastruktur digital di kawasan urban heterogen.

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan baru dalam pengembangan teori mengenai literasi digital berbasis lokal. Selain menambah dimensi baru dalam kajian pembangunan digital, penelitian ini juga mendorong munculnya kerangka analisis baru yang mempertimbangkan sinergi antara keterampilan, infrastruktur, serta kearifan lokal masyarakat kota dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi digital. Pendekatan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa proses digitalisasi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

2. Signifikansi Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merancang kebijakan pembangunan infrastruktur dan layanan digital yang lebih inklusif, khususnya di kawasan perkotaan dengan tingkat literasi digital yang masih rendah seperti Kecamatan Banjarmasin Timur.

Penelitian ini juga dapat mendorong integrasi program literasi digital ke dalam strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis teknologi. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merancang intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti pelatihan digital berbasis komunitas, penguatan ekosistem UMKM digital, serta penyediaan akses internet dan perangkat teknologi yang terjangkau. Dengan pendekatan yang berbasis data dan kontekstual, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu mendorong

transformasi digital yang lebih merata dan berkeadilan.

3. Signifikansi Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam memperkaya literatur terkait digitalisasi ekonomi, khususnya dalam konteks masyarakat perkotaan yang hampir sepenuhnya terjangkau secara digital. Penelitian ini menyoroti pentingnya literasi digital sebagai faktor krusial dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital.